

SKRIPSI

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI

MUH ALIF FEBRI RAMLI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ALIF FEBRI RAMLI
A011191082



Kepada:

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

SKRIPSI

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI

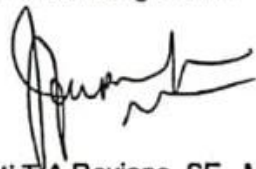
Disusun dan diajukan oleh :

MUH ALIF FEBRI RAMLI
A011191082

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 04 Juli 2023

Pembimbing Utama



Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 1999032 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Saiful SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI

Disusun dan diajukan oleh :

MUH ALIF FEBRI RAMLI
A011191082

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Juli dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Indraswati T.R., SE., MA., CWM®.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Anggota	3..... 
4.	Randi Kurniawan, S.E., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama Mahasiswa : MUH ALIF FEBRI RAMLI

Nomor Pokok : A011191082

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi di Pulau Sulawesi*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak ciptah pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan



Muh Alif Febri Ramli

A011191082

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI”**. Adanya skripsi ini merupakan sebagai bukti penulis untuk menghasilkan karya ilmiah untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas kehendak serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
2. Kedua orang tua penulis, Ramli S. Sos dan Jusmawati, penulis sangat berterimakasih atas didikan, motivasi, semangat, kepercayaan, serta doa yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Untuk

ayah penulis, saya ingin mengucapkan terimakasih sudah membesarkan penulis sampai saat ini. Untuk ibunda penulis, saya ingin mengucapkan bahwa saya mencintai dan bersyukur bahwa selama hidupnya penulis, beliau tidak hentinya memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada penulis. Untuk kedua orang tua penulis, saya ingin mengucapkan bahwa penulis sebentar lagi akan mengambil keputusan yang akan menentukan kehidupannya kedepan.

3. Adik penulis Siti Fatima Z.R, Nayla Maharani, Muh Faiz As-Zikra, dan Nur Nadhifa, terimakasih sudah memberikan semangat dan kepercayaan kepada penulis sebagai seorang kakak, semoga kita berlima dapat menjadi anak yang sholeh dan sholeha dan dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua kita.
4. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane., SE., MA., CWM® dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis. Terimakasih atas saran, masukan, kesabaran dan kritik dalam membimbing penulis dalam mewujudkan skripsi ini, penulis berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Ibu Indras dan juga Pak Hamrullah serta pintu rezekinya dibuka selebar-lebarnya serta selalu dalam lindungan oleh Allah SWT.
5. Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si dan Bapak Randi Kurniawan, SE., M.Sc sebagai dosen penguji yang telah meberikan saran dan kritik yang membangun selama proses ujian seminar proposal dan juga seminar hasil, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis merupakan ilmu baru oleh penulis.
6. Prof. Dr. Nursini, SE., MA dan keluarga yang telah memberikan saran, masukan, dan kritikan yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Penulis selalu berdoa semoga Prof Nursini dan keluarga selalu di berikan kesehatan serta rezeki yang lancar.


7. Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat ganda.
8. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan agar tetap dapat berdedikasi tinggi dan memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu ekonomi FEB-UNHAS.
9. Sahabat kuliah penulis dari maba sampai saat ini, Rendi Kumar Sahbastian, Harol Masalle, Muhammad Rafli, Mega Utami, Erianti Asi Safitri, Nanda Bahtiar, Uswatun Hasanah Tallesang, Fathiyah Ramadhani. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan motivasinya serta apapun bantuan yang membuat penulis bangga memiliki sahabat seperti kalian. Sekali lagi terimakasih telah menemani penulis baik dalam keadaan sedih maupun senang. Semoga pertemanan ini terus terjalin sampai kapan pun.
10. TIKIM Makassar tempat penulis melaksanakan magang. Terkhusus kepada Pak Alex, Pak Iqbal, Kak Anggi, dan Ibu Neni terimakasih telah memberikan pengalaman dan ilmu yang tidak penulis pelajari di bangku perkuliahan dan sekali lagi terimakasih atas motivasi selama penulis melaksanakan magang di Imigrasi Kelas I TPI Makassar.
11. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2019 (GRIFFINS) yang senantiasa selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat hingga penulis bisa berada

pada titik ini. Terimakasih telah kebersamai penulis bisa berproses sebagai mahasiswa di FEB_UNHAS.

12. Teman-teman Departemen Pengembangan Minat dan Bakat Arif, Saiful, Mifta, Yusli, dan Tasha atas kerjasama dan momen-momen selama berproses selama satu periode kepengurusan.
13. Keluarga besar HIMAJIE, terimakasih telah menjadi wadah penulis dalam berproses pengembangan diri menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Himajie adalah tempat bercerita, berkumpul, belajar dan menciptakan momen-momen yang tak terlupakan oleh penulis.
14. Keluarga besar FoSEI UNHAS, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar ekonomi islam yang merupakan ilmu yang sangat penting untuk penulis dalam menjalani kehidupan yang akan datang.
15. Dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan atas segala urusannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala saran dan kritik dari berbagai pihak demi terwujudnya karya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua. Aamin.

Makassar, 18 Juni 2023



Muh Alif Febri Ramli

ABSTRAK

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU SULAWESI

Muh Alif Febri Ramli
Indraswati
Hamrullah

Ketimpangan pada dasarnya terjadi karena terdapat perbedaan kadungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing wilayah oleh karena itu kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga berbeda. Ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan yang serius apabila tidak mampu diatasi dengan hati-hati. Permasalahan ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi menjadi permasalahan yang perlu diatasi bersama-sama oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepadatan penduduk, investasi PMDN, dan pengeluaran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan pendekatan "*random effect*" dengan kurun waktu 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan variabel investasi PMDN dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan provinsi di Pulau Sulawesi.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Kepadatan Penduduk, Investasi PMDN, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

ANALYSIS OF PROVINCIAL DEVELOPMENT INEQUALITY IN SULAWESI ISLAND

Muh Alif Febri Ramli
Indraswati
Hamrullah

Inequality basically occurs because there are differences in natural resource endowments and differences in demographic conditions in each region, therefore the ability of a region in the development process is also different. Development inequality is a serious problem if it cannot be addressed carefully. The problem of inequality that occurs between regencies/municipalities in the province of Sulawesi Island is a problem that needs to be addressed together by each regency/municipality government in the province of Sulawesi Island. Therefore, this study aims to analyze the impact of population density, foreign direct investment, and government expenditure in reducing development inequality among districts/municipalities in the province of Sulawesi Island. The data analysis uses panel data regression with a "random effect" approach for the period 2017-2021. The results showed that the population density variable was not significant to development inequality. Meanwhile, the PMDN investment and government expenditure variables have a significant effect on the development inequality of provinces on Sulawesi Island.

Keywords: Development Inequality, Population Density, PMDN Investment, Government Spending

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep dan Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	11
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3 Ketimpangan Pembangunan	18
2.1.4 Aglomerasi	19
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.6 Investasi.....	23
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	25
2.2.1 Hubungan Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pembangunan	25
2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan	26
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan.....	27
2.3 Studi Empiris	28
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	30

2.5	Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2	Jenis dan Sumber Data	31
3.3	Metode Analisis data	32
3.3.1	Model Data Panel.....	32
3.3.2	Estimasi Model Data Panel	33
3.3.3	Pemilihan Model Data Panel	34
3.4	Defenisi Operasioanl Variabel.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Objek dan Variabel Penelitian.....	38
4.1.1	Provinsi Gorontalo.....	39
4.1.2	Provinsi Sulawesi Barat.....	43
4.1.3	Provinsi Sulawesi Tengah	46
4.1.4	Provinsi Sulawesi Utara	50
4.1.5	Provinsi Sulawesi Tenggara	53
4.1.6	Provinsi Sulawesi Selatan	57
4.2	Pemilihan Model Data Panel.....	61
4.2.1	Uji Chow.....	62
4.2.2	Uji Hausman.....	62
4.2.3	Random Effect Model (REM).....	63
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.3.1	Kepadatan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pembangunan	66
4.3.2	Investasi PMDN Terhadap Ketimpangan Pembangunan.....	66
4.3.3	Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan.....	68
BAB V PENUTUP		71
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Provinsi di Pulau Sulawesi Periode 2017 – 2021	4
Tabel 1.2 PDRB Perkapita Provinsi di Pulau Sulawesi Periode 2017 – 2021	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4.1 Indeks Wiliamson Gorontalo 2017 – 2021	40
Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Gorontalo 2017 – 2021 (jiwa/km ²).....	41
Gambar 4.3 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Gorontalo 2017 – 2021 (miliar rupiah).....	42
Gambar 4.5 Indeks Wiliamson Sulawesi Barat 2017 – 2021	44
Gambar 4.6 Kepadatan Penduduk Sulawesi Barat 2017 – 2021 (jiwa/km ²) ..	45
Gambar 4.7 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi barat 2017 – 2021 (miliar rupiah).....	46
Gambar 4.8 Indeks Wiliamson Sulawesi Tengah 2017 – 2021	47
Gambar 4.9 Kepadatan Penduduk Sulawesi Tengah 2017 – 2021 (jiwa/km ²)....	48
Gambar 4.10 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Tengah 2017 – 2021 (miliar rupiah).....	49
Gambar 4.11 Indeks Wiliamson Sulawesi Utara 2017 – 2021	50
Gambar 4.12 Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara 2017 – 2021 (jiwa/km ²)	51
Gambar 4.13 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Utara 2017 – 2021 (miliar rupiah).....	53
Gambar 4.14 Indeks Wiliamson Sulawesi Tenggara 2017 – 2021.....	54
Gambar 4. 15 Kepadatan Penduduk Sulawesi Tenggara 2017 – 2021 (jiwa/km ²)	55
Gambar 4. 16 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Tenggara 2017 – 2021 (miliar rupiah).....	56
Gambar 4. 17 Indeks Wiliamson Sulawesi Selatan 2017 – 2021	58
Gambar 4. 18 Kepadatan Penduduk Sulawesi Selatan 2017 – 2021	59

Gambar 4. 19 Investasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan
2017 – 2021 (miliar rupiah)..... 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan usaha atau sebuah proses yang multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, serta kelembagaan untuk meningkatkan taraf hidup yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita masyarakat suatu region.

Taraf hidup yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Dalam pembangunan terdapat tiga poin penting yaitu kecukupan (sustence), harga diri (self-esteem), dan kebebasan (freedom). Dengan kata lain tujuan inti dari adanya pembangunan yaitu untuk meningkatkan ketersediaan serta adanya pemerataan distribusi di berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, adanya peningkatan standar hidup, dan terdapat perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro dan Smith, 2006).

Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia yang beragam memberikan berbagai macam potensi wilayah berbeda. Adanya perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik itu kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antara golongan penerima pendapatan. Pada dasarnya setiap wilayah memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menggunakan sumber daya alam yang ada pada wilayahnya, namun jika kebutuhan hidup

masyarakat tidak terpenuhi, maka kebutuhan masyarakat tersebut akan terpenuhi di wilayah lainnya.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, wilayah yang memiliki sumber daya alam yang ada, akan mampu membuat wilayahnya memiliki ciri khusus dan berbeda dengan wilayah lainnya. Ketika wilayah yang memiliki sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka wilayah tersebut memperoleh nilai tambah bagi wilayahnya. Benefit yang diperoleh dari hal tersebut, dimana wilayahnya menjadi wilayah yang maju dan unggul dari wilayah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan terus meningkat tidak dapat menghilangkan ketimpangan dalam proses pembangunan. Ketimpangan pembangunan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dimana permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan hal yang sangat nyata untuk dilihat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan permasalahan yang serius apabila tidak mampu diatasi dengan hati-hati hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks seperti permasalahan terhadap kependudukan, ekonomi, sosial dan politik serta dalam lingkup makro akan merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin di capai suatu wilayah.

Dampak positif dari adanya ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju agar dapat bersaing dan dapat meningkatkan pertumbuhannya agar tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari adanya ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak

negatif dari adanya ketimpangan inilah yang akan menjadi permasalahan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan antar wilayah (regional disparity) muncul karena tidak meratanya dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju.

Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah–daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanaman modal (investor) yang memilih daerah dengan fasilitas prasarana yang lebih lengkap di bandingkan dengan daerah yang memiliki fasilitas prasarana yang tidak lengkap atau kurang memadai. Selain itu pendekatan pembangunan sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan makin melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Potensi konflik antar wilayah menjadi semakin besar membuat wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunannya mulai menuntut hak-haknya.

Data di bawa ini merupakan data PDRB Provinsi di Pulau Sulawesi. Jika kita perhatikan dari data bahwa ternyata Provinsi Sulawesi Selatan menjadi leader dari Provinsi yang terdapat pada Pulau Sulawesi hal tersebut dapat kita buktikan dari total PDRB per tahun yang dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan rata-rata nilai PDRB periode tahun 2017 sampai 2021 sebesar Rp. 320.006,76 miliar rupiah yang dimana hal tersebut mengalahkan rata-rata PDRB per kapita per tahun Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel 1.1.

Tabel 1.1 PDRB Provinsi di Pulau Sulawesi Periode 2017 – 2021
(miliar rupiah)

Tahun/Provinsi	Gorontalo	Sulawesi Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan
2017	25.090,13	29.282,48	97.474,85	79.484,02	83.001,82	288.814,17
2018	26.719,27	31.114,14	103.593,33	84.249,72	88.328,51	309.156,19
2019	28.429,97	32.843,80	111.003,07	89.009,26	94.053,52	330.506,38
2020	28.425,21	32.054,50	134.153,23	88.126,37	93.446,81	328.154,57
2021	29.109,95	32.874,62	146.987,35	91.790,92	97.276,95	343.402,51
Rata-Rata	27.554,91	31.633,91	118.642,37	86.532,06	91.221,52	320.006,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan (Data Diolah, 2023).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah merupakan suatu proses pembangunan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup daerah. Pembangunan nasional itu sendiri dilakukan dalam upaya mendorong berkembangnya pembangunan daerah dan disisi lain pembangunandaerah juga akan terus ditingkatkan dalam upaya memperkuat dan memperkokoh pembangunan nasional dan struktur perekonomian dalam lingkup nasional yang saling berkesinambungan.

Untuk melihat seberapa besar produktivitas penduduk suatu wilayah dapat kita lihat melalui besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Tabel 1.2 dibawa ini yang menyajikan data

PDRB per kapita provinsi yang ada di Pulau Sulawesi selama periode tahun 2017–2021.

**Tabel 1.2 PDRB Perkapita Provinsi di Pulau Sulawesi Periode 2017 – 2021
(juta rupiah)**

Tahun/Provinsi	Gorontalo	Sulawesi Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan
2017	29.57	29.68	45.3	44.74	41.28	47.82
2018	31.83	32.06	55.52	48.1	44.49	52.64
2019	34.21	33.59	60.8	52.17	47.78	57.18
2020	34.21	33.31	63.75	50.52	47.24	55.68
2021	37.17	35.04	81.73	54.04	52.29	59.65
Rata-Rata	33.40	32.74	61.42	49.91	46.62	54.59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan (Data Diolah, 2023)

Dari hasil pengolahan data pada tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sulawesi yang dilihat melalui data PDRB perkapita menunjukkan bahwa selama periode 2017 sampai dengan 2021, PDRB perkapita provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan tren yang positif atau pertumbuhan PDRB perkapitanya meningkat setiap tahunnya.

Bisa dilihat untuk Provinsi Gorontalo tahun 2017 PDRB perkapita sebesar Rp. 29,57 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 PDRB perkapitanya sebesar Rp. 37,17 juta rupiah. Untuk Provinsi Sulawesi Barat PDRB perkapita 2017 sebesar Rp. 29,68 juta rupiah sampai dengan tahun

2019 PDRB perkapita sebesar Rp. 33,59 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi tidak begitu besar perbedaannya dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan PDRB perkapita sebesar Rp. 35,04 juta rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan PDRB perkapita terbesar selama tahun 2017 sampai tahun 2021 jika kita bandingkan pertumbuhan PDRB perkapita tiap tahun Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi yang lainnya. PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 sebesar Rp. 45,30 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 dengan PDRB perkapita mencapai Rp. 81,73 juta rupiah.

Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan PDRB perkapitanya hampir sama setiap tahunnya jika kita lihat berdasarkan tabel 1.2 di atas. Jika kita kaitkan dengan keadaan sekarang bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan penduduk terbanyak jika kita bandingkan dengan provinsi yang terdapat pada Pulau Sulawesi.

Berdasarkan data PDRB per kapita tabel 1.2 dapat diketahui bahwa provinsi dengan nilai rata-rata PDRB per kapita tertinggi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu Provinsi Sulawesi Tengah yang dimana rata-rata PDRB per kapitanya per tahun sebesar Rp. 61.42 juta rupiah, kemudian di susul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai rata-rata PDRB per kapita per tahun sebesar Rp. 54.94 juta rupiah kemudian di susul oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai rata-rata PDRB per kapita per tahun sebesar Rp. 49.91 juta rupiah kemudian di susul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Perbedaan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa adanya ketimpangan pembangunan antar

kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat terhadap suatu wilayah akan memberikan dampak negatif terhadap wilayah-wilayah lainnya. Hal ini juga mengakibatkan adanya peningkatan konsentrasi aktivitas ekonomi terhadap pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah tersebut. Meski demikian, konsentrasi terhadap aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu tidak dapat dihindari dan bahkan hal tersebut sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan, sedangkan ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan yang wajar asalkan masih dalam batas yang layak.

Martin dan Sunley (1998) menyatakan bahwa regional convergence merupakan proses yang berjalan pelan dan terjadi secara kontinyu. Jadi, suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan adanya pemerataan memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga perlu diteliti secara kontinyu. Ketimpangan pembangunan dapat berkurang apabila didalam proses pemerataan pembangunan ada sumber daya manusia yang menjadi inti penggerak dimana sumber daya manusia yang dimaksud yaitu jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi faktor penghambat/pendorong dalam pembangunan. Jika jumlah penduduk meningkat dibarengi dengan produktivitas penduduk di daerah yang bersangkutan juga tinggi, sehingga tidak akan menyebabkan ketimpangan.

Dalam hal mencegah adanya ketimpangan dalam suatu wilayah perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkat. Dimana jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat

dan tidak diimbangi dengan pemerataan hal ini akan menyebabkan ketimpangan suatu wilayah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Ketimpangan Pembangunan Provinsi Di Pulau Sulawesi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah tingkat kepadatan penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi?
2. Apakah investasi PMDN berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kepadatan penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi.
2. Untuk mengetahui apakah investasi PMDN berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sulawesi.
3. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur ilmiah dalam melihat seberapa besar ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi.
- b. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menguji relevansi teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti.

2. Mafaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk penulis dalam menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum atau akademisi yang ingin mengetahui terkait dengan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi dan penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan topik ini.

c. Bagi pemangku kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pemangku kebijakan, seperti pemerintah dalam mengambil keputusan/kebijakan terkait dengan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah sebuah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya dengan adanya garis batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Oleh karena itu, Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Menurut Jhingan (2012) pembangunan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi sebagai faktor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang sebagai faktor non ekonomi.

Faktor ekonomi yang dimaksud yaitu:

1) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam atau tanah, yang mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, dan laut. Namun kekayaan alam saja belum cukup dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga dapat lebih efisien.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.

3) Organisasi

Disamping perusahaan swasta, organisasi juga mencakup pemerintah, bank dan lembaga internasional yang ikut terlibat dalam penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi.

4) Kemajuan Teknologi.

Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atas inovasi baru sehingga mampu meningkatkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas, sehingga membawa kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri.

Faktor no-ekonomi juga memiliki arti yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Faktor Sosial

Jika perkembangan ekonomi ingin berjalan dengan baik, pandangan, nilai, dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat harus menyadari cita-cita dan tujuan hidup mereka sehingga memiliki kemampuan untuk meraihnya.

2) Faktor Manusia.

Suatu negara akan mampu tumbuh lebih baik dalam hal perekonomian apabila negara tersebut memiliki modal manusia yang baik. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada sejumlah sumber daya manusia namun tetapi lebih kepada efisiensi sumber daya manusianya, hal ini yang disebut sebagai pembentukan modal insani dimana proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

3) Faktor Politik dan Administrasi.

Pemerintah harus dapat memberikan kondisi administrasi yang bersih dan situasi politik yang stabil, sehingga dapat merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi.

Jhingan (2012) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
- 3) Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
- 4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
- 5) Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
- 6) Persyaratan sosial-budaya. Wawasan sosial budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
- 7) Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana terjadi peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Karena biasanya pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada tahun tertentu dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Sukirno (2011) "pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat". Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertumbuhan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang.

Menurut Hasyim (2011), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurutnya terdapat tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dimana; (1) Peningkatan persediaan barang secara terus-menerus; (2) Teknologi

maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan;

2. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Beberapa negara berkembang sebagian besar bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan. Sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia;

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong terjadinya percepatan proses pembangunan. Dengan berkembangnya iptek dalam laju pertumbuhan ekonomi akan memudahkan dalam proses distribusi barang menjadi semakin mudah;

4. Faktor Budaya

Budaya akan memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau

pendorong dalam proses pembangunan akan tetapi dapat juga menjadi penghambat dalam proses pembangunan;

5. Sumber Daya Modal

Selain empat faktor diatas sumber daya modal juga termasuk, sebab manusia membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang – barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi sebab barang – barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Menurut Adelfina dan Jember (2016) untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB di tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}) atau dengan rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB} - \text{PDRB (t - 1)}}{\text{PDRB (t - 1)}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan. Tujuan utama atau tujuan pokok dari sebuah pembangunan ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, maka dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memberi kesempatan untuk pemerintah memenuhi kebutuhan utama rakyatnya, tetapi sejauh mana kebutuhan ini dapat dipenuhi tergantung kepada kemampuan pemerintah dalam menyebarkan sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat untuk memperlebar kesempatan kerja (Hasan, 2018).

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di dalam teori tersebut dimunculkan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.

Menurut hipotesa Neo-klasik proses awal pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terus terjadi hingga mencapai titik puncak dalam pembangunan. Kemudian, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dapat kita simpulkan bahwa menurut hipotesa Neo-klasik bahwa pada setiap negara yang sedang berkembang pada umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, berbeda dengan negara maju dimana ketimpangan yang terjadi lebih rendah.

Nadiroh (2009) mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam proses kegiatan ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Karena adanya perbedaan ini maka kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Menurut Sjafrizal (2012) faktor – faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di suatu wilayah:

- a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana terjadi peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat penambahan penduduk.

b) Investasi

Investasi dapat kita artikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan untuk produksi dan menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang ada dalam sistem perekonomian. Jika investasi semakin tinggi maka ketimpangan wilayah juga akan tinggi.

c) Aglomerasi

Aglomerasi merupakan proses konsentrasi secara spasial dari aktifitas ekonomi pada kawasan perkotaan yang dimana terjadi penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang dihubungkan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen (Montgomery dalam Kuncoro, 2002). Semakin tinggi tingkat aglomerasi maka ketimpangan juga akan semakin besar.

d) Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang sedang tidak bekerja dan sedang aktif dalam mencari kerja. Konsep ini sering dikatakan sebagai pengangguran terbuka, jika pengangguran meningkat maka ketimpangan wilayah juga akan semakin tinggi.

2.1.4 Aglomerasi

Dalam teori, aglomerasi merujuk pada konsentrasi aktivitas ekonomi di daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencapai penghematan biaya karena

keberadaan industri yang saling berdekatan (*economies of proximity*). Fenomena ini dapat dijelaskan dengan adanya kelompok perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen yang terkumpul secara spasial (Montgomery dalam Kuncoro 2002). Diharapkan dalam pembentukan aglomerasi industri ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan merujuk pada perbedaan tingkat standar hidup relatif di seluruh masyarakat, yang disebabkan oleh aglomerasi ekonomi akibat perbedaan faktor anugerah awal (*endowment factor*). Keberadaan heterogenitas dan karakteristik yang beragam dalam suatu wilayah menyebabkan cenderung terjadinya aglomerasi dan interaksi antar sektor ekonomi di daerah tersebut.

Teori aglomerasi dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk melihat pengaruh kepadatan penduduk terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi. Sebab penduduk di bedakan menjadi dua perspektif yaitu penduduk sebagai sumber daya pembangunan dan penduduk sebagai objek pembangunan.

a) Penduduk Sebagai Sumber Daya Pembangunan

Sebagai subjek pembangunan, penduduk harus diberdayakan dan ditingkatkan kemampuannya agar dapat menjadi pendorong pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi penduduk yang terlibat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan penduduk agar mereka dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dinamis. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.

Keadaan dan kondisi kependudukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika jumlah penduduk besar disertai dengan kualitas penduduk yang baik, hal ini akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya, jika jumlah penduduk besar diiringi dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, hal ini dapat menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi proses pembangunan.

b) Penduduk Sebagai Objek Pembangunan

Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa semakin padat suatu daerah maka beban pembangunan juga akan semakin berat. Pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Maka dari ketika kepadatan penduduk suatu daerah tinggi maka tingkat ketimpangan juga akan meningkat sebab pemenuhan kebutuhan masyarakatnya semakin besar maka tanggung jawab pembangunan terutamanya kepada pemerintah daerah semakin besar jika penduduk di pandang sebagai objek dari adanya pembangunan.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengatur proses berjalanya perekonomian dalam suatu wilayah dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya di negara yang sedang berkembang

karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan sejalan pula dengan terjadinya peningkatan ekonomi suatu negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sebagai berikut:

- a) Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan;
- b) Peningkatan penyediaan layanan pemerintah dari para penerima layanan;
- c) Meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan.

Berdasarkan ketiga faktor diatas dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperoleh penerimaan yang cukup atas dasar untuk menetapkan besarnya pengeluaran pemerintah.

Sukirno (2004) mengartikan bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk proses pembiayaan administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, pembiayaan sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembiayaan perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, serta pembiayaan berbagai jenis infrastruktur dalam proses pembangunan.

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbagai atas dua jenis pengeluaran pemerintah khususnya di Indonesia:

- a) Pengeluaran Rutin, pengeluaran yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan;

- b) Pengeluaran Pembangunan, pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Menurut Dumairy (1999) pemerintah memiliki beberapa peran seperti peran alokatif, peran distributif, peran stabilitatif, dan peran dinamisatif.

Teori pengeluaran pemerintah menurut Romer berfokus pada peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui kebijakan investasi dalam penelitian, inovasi, dan pendidikan. Romer menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang tepat dalam bidang-bidang ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Salah satu aspek penting dalam teori pengeluaran pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan penelitian. Pemerintah dapat melakukan investasi dalam infrastruktur penelitian dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi baru. Dengan demikian, pengetahuan dan teknologi baru dapat dihasilkan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Teori pengeluaran pemerintah menurut Romer menyatakan bahwa peran pemerintah bukan hanya sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, investasi pemerintah dalam penelitian, inovasi, dan pendidikan dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Investasi

Investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang

dihasilkan dan akan memberikan efek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan (Sjafrizal, 2008).

Agar investasi dapat mengalir secara merata ke suatu wilayah maka hal yang paling penting adalah perbaikan infrastruktur agar tercipta iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama sebagai pondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, dan hal ini akan menjadi penyambung ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut teori Harrod-Domar bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar menjelaskan bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang lebih panjang dapat membuat investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan teori yang di jelaskan oleh Harrod-Domar bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, atau ketika investasi pada suatu wilayah mengalami penurunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat pada wilayah tersebut menjadi rendah dikarenakan tidak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Ketika investasi terpusat pada suatu wilayah, hal ini akan berdampak pada ketimpangan distribusi investasi yang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk merupakan suatu kondisi dimana semakin padat jumlah manusia pada suatu wilayah yang dihuni. Dalam hal ini luas wilayah yang tidak mencukupi kebutuhan penduduk terhadap ruang di suatu permukiman. Ketika kepadatan penduduk menjadi tidak terkendali hal ini akan berdampak kepada lingkungan seperti terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, serta tidak tercukupinya lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja yang ada.

Terkonentrasinya pembangunan dan kepadatan penduduk pada pusat kota disebabkan oleh kepadatan penduduk pada suatu daerah. Hal ini yang mempengaruhi proses pembangunan hanya terjadi pada pusat kota, sehingga hal ini akan meningkatkan kesenjangan sosial antar daerah padat penduduk dan daerah jarang penduduk.

Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa saja terjadi terhadap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi ketika kepadatan penduduk tidak merata hal ini akan memberikan efek terhadap kualitas pembangunan di suatu daerah.

2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba yang nantinya akan mendorong berkembangnya pembangunan yang berpusat pada wilayah - wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah - wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 2014).

Dalam teori pertumbuhan endogen, perkembangan teknologi merupakan faktor yang penting dan berpengaruh terhadap investasi. Menurut (Todaro, 1994), model pertumbuhan endogen dapat kita gunakan dalam mengetahui potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara berkembang dengan rasio modal tenaga kerja yang masih rendah. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri padat teknologi ataupun modal, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

Menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) investasi cenderung akan menambah ketidakmerataan. Pada daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya pada daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang juga rendah. Di lain sisi investasi khususnya pada investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Hal ini, kekuatan yang memiliki peran yang lebih banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin meningkat.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan Sukirno (2006). Todaro (2000) mengutarakan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu tujuan dari Desentralisasi adalah mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Sjafrizal (2008), bahwa dalam mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan dapat dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi secara spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal pada wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Dalam rangka penyelesaian masalah ketimpangan maka diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang berskala kecil.

Peran pemerintah tercermin melalui pengeluaran pemerintah yang merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program - program ataupun kegiatan - kegiatan dalam mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah (Dhyatmika, 2013).

2.3 Studi Empiris

Kurniati Masyur, Nursini, dan Hamrullah (2021) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”. Tujuan penelitian untuk mengukur dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

Gantara dan Agus (2016) dengan judul penelitian “Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur 2010-2014”. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

pada tahun 2010-2014. Metode penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan IPM dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

Rosmeli (2015) dengan judul penelitian “Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia”. Tujuan penelitian untuk melihat ketimpangan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Metode penelitian menggunakan data panel Provinsi-Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan PMA dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Etik Umiyati (2014) dengan judul penelitian “Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera”. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatra. Metode penelitian menggunakan Indeks Wiliamson dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda- beda, hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumberdaya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh provinsi tersebut.

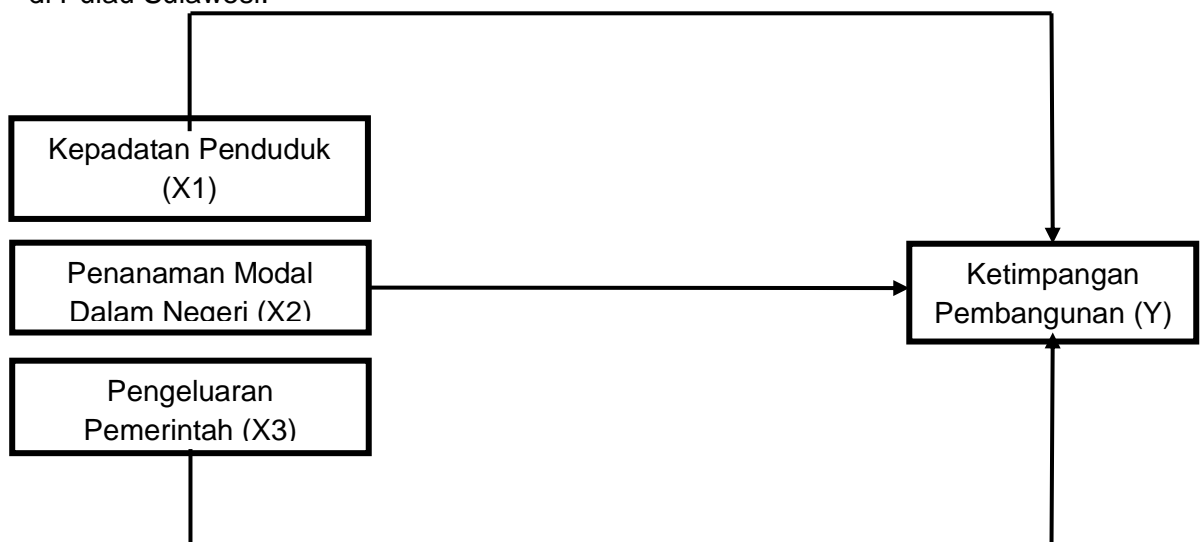
Lim Syafiq (2021) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Provinsi dan

Kepadatan Penduduk terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Pulau Jawa Tahun 2013 - 2017". Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan pengolahan data menggunakan Eviews dan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah sedangkan pendapatan asli daerah dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka konseptual dengan variabel independen adalah kepadatan penduduk (X_1), penanaman modal dalam negeri (X_2), dan pengeluaran pemerintah (X_3), sedangkan variabel dependen ketimpangan pembangunan (Y) antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi.

Variabel yang digunakan merupakan variabel yang mempengaruhi kondisi ketimpangan pembangunan, oleh karena itu dengan meneliti hal ini dapat menjadi referensi serta informasi baru terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam provinsi di Pulau Sulawesi.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kemungkinan atau dugaan sementara untuk menjawab masalah yang diajukan dan masih belum teruji kebenarannya berdasarkan fakta yang ada. Berpedoman pada rumusan masalah dan juga pada tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Diduga tingkat kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi
- 2) Diduga investasi PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi
- 3) Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sulawesi